EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
(Studi Kasus Pada Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Barat)

FOOD SECURITY DEVELOPMENT POLICY EVALUATION
(Case Study on Agricultural Crops Sector in West Java Province)

Rosita Novi Andari
PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055,
Email: rositanovi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the outcomes (effects) of development policy in the field of food security sector of Food Crops in West Java Province . This study used a qualitative approach to data collection techniques through desk research and qualitative descriptive data analysis . The results showed that the impact of development policies in food security in West Java Province consists of the first , the physical effects : decreased utilization of agricultural land (paddy) and utilization of agricultural infrastructure , especially the activities of Land and Water (PLA) . Second , the socio-economic impact : (1) increasing agricultural production to group crops , fruits , ornamental and medicinal plants while for rice and vegetables tend to go up and down , (2) decrease in the percentage of residents who work in the agricultural sector (2008-2011) and then increased again in 2012 , (3) increasing the income of farmers in general , (4) the low priority the achievement of food security in West Java province when compared with the national average . Based on this, the policy recommendations of the implementation of development policies in food security policy is to continue to support the achievement of optimal results and reformulate other policies that have not been optimized as an increase in agricultural land management programs and agricultural infrastructure , agricultural human resource development programs , and social welfare programs farmers.
Keywords : food security sector development , policy evaluation , agriculture

A. PENDAHULUAN

Terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28A dan pasal 28C Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Upaya membangun ketahanan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Menurut Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional.Kondisi ketahanan pangan nasional yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian dan perikanan dan peningkatan pendapatan petani, serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk di Indonesia dengan persentase jumlah pekerja sebesar yaitu 35,1% atau sebanyak 38.882.134 penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (www.bps.go.id). Menurut hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 yang dilakukan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013) menyebutkan bahwa secara umum selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 % per tahun, namun angka tersebut masih dibawah target yaitu 3,7-3,9% per tahun. Kodisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengukur perkembangan rasio nilai yang diterima petani dari hasil usaha taninya terhadap biaya produksi dan biaya kebutuhan sehari-harinya meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009. Tabel 1 berikut ini menunjukkan capaian prioritas nasional ketahanan pangan.

Tabel 1
Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.

Indikator	Satuan	Status Awal	Target 2014	Capaian			Perkiraan capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Peningkatan Pertumbuhan Pertanian							
PDB Pertanian	%	3,96	3,7-3,9	2,99	3,35	3,97	perlu kerja keras
Laju Peningkatan Produksi Pangan Utama							
Padi	%	6,75	3,39	3,22	-1,07	5	perlu kerja keras
Jagung	%	8,04	10,02	3,96	-3,37	9,83	perlu kerja keras
Kedelai	%	25,63	20,05	-6,92	-6,15	0,04	Sangat sulit
Gula	%	-2,96	12,55	7,02	-17,30	16,75	perlu kerja keras
Daging Sapi	%	16,15	7,30	6,65	11,18	4,16	sudah tercapai/*on track*
Perikanan	Juta ton	10,82	21,09	18,80	6,20	19,98	sudah tercapai/*on track*
Kesejahteraan Petani							
Nilai Tukar Petani	Indeks	101,20	115-120	102,80	105,75	105,87	perlu kerja keras
Luas layangan irigasi yang direhabilitasi	Ha (ribu)	623,91	1.340	293,04	284,14	98	perlu kerja keras

Sumber: Bapenas, 2013

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pemerintah masih perlu kerja keras dalam mencapai sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan yaitu terciptanya kemandirian ketahanan pangan pada akhir tahun 2014 dengan pencapaian surplus beras 10 juta ton dan meningkatnya produksi komoditas pangan utama lainnya, meningkatnya PDB sektor pertanian sekitar 3,7 % per tahun dan NTP sebesar 115-120 pada tahun 2014.

Pencapaian sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusanh Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa pertanian dan ketahanan pangan merupakan bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi kedua yang memiliki kontribusi besar dalam mensuplai ketersediaan pangan nasional, terutama produksi padi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Menurut Data Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Agustus 2013 (BPS, 2013) produksi padi Provinsi Jawa Barat tahun 2012 mencapai 11.271.861ton atau sekitar 16,32 % dari total produksi padi nasional sebesar 69.056.126 ton.

Sektor pertanian merupakan sektor dominan ketiga terbesar dalam struktur perekonomian di Provinsi Jawa Barat setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Menurut data Jabar Dalam Angka (2012) kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB mencapai nilai 11,98 persen. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

B. RUMUSAN MASALAH

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian merupakan hal sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang pertanian, namun demikian pemerintah masih perlu kerja keras dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut melalui peran aktif dari pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah bagaimana hasil capaian (dampak) kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di sektor Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Jawa Barat?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui bagaimana hasil capaian (dampak) kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut. Menurut Wibawa, dkk (1994:9) evaluasi

kebijakan kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan, dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan tersebut dapat mendorong evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan maupun konteks kebijakan (kondisi lingkungan yang memperngaruhi kebijakan).

Dunn, Ripley (dalam Samodra Wibawa, 1994:10-11), evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi yaitu: (1) eksplanasi, untuk memotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya, (2) kepatuhan, untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan, (3) *auditing*, untuk mengetahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Dan (4) akunting, untuk mengetahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Lebih lanjut Samodra Wibawa (1994:29) evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Evaluasi dampak dapat dilakukan baik setelah maupun sebelum kebijakan berlangsung sehingga sering disebut analisis atau *assessment*. Lebih lanjut Finsterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994:34-35) menyebutkan bahwa dalam melakukan analisis terhadap dampak kebijakan, ada beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis yaitu: (1) peluang terjadinya dampak, (2) jumlah orang yang terkena dampak, (3) untung rugi yang diderita subyek dampak, (4) ketersediaan data untuk melakukan analisis, (5) relevansi terhadap kebijakan, dan (6) perhatian publik terhadap dampak tersebut. Adapun langkah-langkah dalam melakukan Analisis Dampak Sosial (ADS) yaitu:

a. Menetapkan kebijakan yang akan dianalisis dan melakukan analisis dampak fisik dan ekonomi
b. Mendeskripsikan dampak sosial
c. Menentukan respon dari individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak
d. Melakukan penyesuaian kebijakan dan
e. Membuat kesimpulan dan rekomendasi.

Dari keseluruhan langkah dalam ADS tersebut, secara spesifik penelitian ini akan fokus pada langkah pertama dan kedua yaitu menetapkan kebijakan yang dianalisis mencakup isi kebijakan dan manajemen programnya setelah itu baru dianalisis apa dampak fisik dan ekonomi secara normatif dapat terjadi dan juga dampak lingkungan pada umumnya. Setelah itu mendeskripsikan dampak sosial dari kebijakan tersebut secara lebih spesifik yaitu unit dampak (unit sosial yang terkena dampak) dan jenis atau aspek dampak (bidang kehidupan yang terkena dampak). Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat, organisasi, kelompok sosial dan sistem sosial lainnya. Sementara itu aspek dampak meliputi dampak fisik dan sosial ekonomi.

Langbein (dalam Samodra Wibawa, 1994:38) menyebutkan ada empat macam dimensi dampak yang diperhatikan yaitu (1) waktu, (2) selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan, (3) tingkat agregasi dampak, dan (4) jenis dampak. Lebih lanjut Weiss (dalam Samodra Wibawa, 1994:39) menambahkan selain itu ada tiga persoalan lain yang perlu diperhatikan yaitu (1) wilayah (scope) program apakah program berlingkup nasional, propinsi, kota, kecamatan atau desa. (2) berapa jumlah individu yang dilayani untuk setiap wilayah program, dan (3) kebaruan program: apakah dampak yang diharapkan oleh program itu dianggap baru. Adapun jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *single program after only* yang oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994:75) merupakan proses penilaian terhadap program setelah meneliti berlangsung sehingga diperoleh informasi mengenai keadaan kelompok sasaran.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokus dan fokus yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah sektor pertanian tanaman pangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *desk research*, dilakukan melalui studi dokumentasi untuk memperoleh berbagai data sekunder (kebijakan-kebijakan, buku, laporan, data statistik tentang pertanian dari BPS dan website Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan sebagainya).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Barat

a. Isi Kebijakan

Pada tingkat nasional, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan melalui Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014 (DKP, 2011). Dalam kebijakan tersebut, secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk membangun ketahanan dan kemandirian pangan baik di tingkat makro (nasional) maupun di tingkat mikro (rumah tangga/individu). Arah pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas ke-5 RPJMN 2010-2014 adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing serta peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Sementara itu, arah kebijakan umum pembangunan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan; dan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan

keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (2) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; dan (3) mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra produksi pangan.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat antara lain dapat dilihat dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat No. 050/Kep/613/PR/2011 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Visi yang ditetapkan adalah "Mewujudkan Petani Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera" sementara salah satu misinya adalah meningkatkan produksi dalam rangka ketahanan pangan. Tujuan dari misi tersebut adalah mendorong peningkatan ketersediaan pangan. Sasarannya adalah ketersediaan pangan masyarakat Jawa Barat. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu (1) meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras, jagung dan kedelai dan (2) menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen.

Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut yaitu meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan, maka kegiatan program yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1) Program peningkatan produksi pertanian
2) Program pemberdayaan sumber daya pertanian
3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak, dan ikan
4) Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

Dari beberapa program tersebut, program yang mendukung pencapaian pembangunan bidang ketahanan pangan adalah program peningkatan produksi pertanian yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
2) Pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura
3) Pengembangan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura
4) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian
5) Fasilitasi Gerakan Multi Aktivis Agribisnis (GEMAR)

Tolak ukur kinerja pembangunan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui beberapa indikator sebagaimana Tabel 2 pada halaman berikut ini:

Tabel 2
Indikator Kinerja Pembangunan Sektor Tanaman Pangan Tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja	Tahun 2008	Target Capaian Setiap Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
2.	Tingkat Kehilangan Hasil		2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
3.	Daya Beli Masyarakat	626,81	628,71	632,11	634,93	637,74	640,55

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2011)

b. Manajemen Program

Manajemen program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari pelaksana program dan pengorganisasian implementasi program di Provinsi Jawa Barat. Program tersebut di implementasikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, dan bina usaha
2) Penyelenggaraan bidang urusan pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha
4) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, susunan organisasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari satu Sekretariat, empat bidang yaitu (1) Bidang Sumber Daya, (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan, (3) Bidang Produksi Tanaman Hortikultura, (4) Bidang Bina Usaha, dan delapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu (1) UPTD Balai Pengembangan Benih Padi di Cihea, (2) UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija di Plumbon, (3) UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di Pasirbanteng, (4) UPTD Balai Pengembangan Benih

Kentang di Pangalengan, (5) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Ciganitri, (6) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Ciganitri, (7) UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan di Cihea, dan (8) UPTD Balai Pelatihan Pertanian di Cihea. Selain itu terdapat dua SPP-SPMA yaitu SPP-SPMA Tanjungsari dan Gegerkalong.

Pelaksana pada lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 1.305 orang dengan jumlah aparatur struktural sebanyak 667 orang, aparatur fungsional sebanyak 515 orang dan honorer 123 orang. Untuk aparatur fungsional terdiri dari Penyuluh pertanian 5 orang, Arsiparis 1 orang, Pustakawan 1 orang, Pengendali OPT 391 orang, Pengawas Benih Tanaman 95 orang, Perencana 3 orang, Petugas Informasi Pasar 12 orang, Brigade Produksi TP 7 orang dan Widyaiswara 18 orang (Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat ,2011).

Sementara itu, pengorganisasian implementasi program pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang terlampir pada lampiran 1.

2. Dampak Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Sektor Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Unit sosial yang terkena dampak dari kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di sektor pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari kelompok sasaran kebijakan yang ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2011) yaitu mencakup sasaran wilayah, sasaran produksi dan sasaran SDM petani. Analisis dampak kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat akan difokuskan pada dampak fisik dan sosial ekonomi pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat terutama di sektor pertanian tanaman pangan.

Menurut data Jawa Barat dalam Angka Tahun 2012, Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 37.116,54 km^2 dan terdiri dari 26 kabupaten/kota yang meliputi 17 kabupaten dan 9 kota, 626 kecamatan dan 5981 desa/kelurahan. Jumlah penduduk di Jawa Barat adalah sebanyak 43.826.775 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.493.124 dimana rata-rata per rumah 3,75.

Berdasarkan laporan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (BPS, 2013:5) menunjukkan bahwa usaha pertanian di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya. Jumlah rumah tangga pertanian di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 tercatat

sebanyak 3.058.612 rumah tangga menurun sebesar 29,61% dari tahun 2003 yang tercatat sebanyak 4.345.148 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tahun 2013 tercatat sebanyak 479 perusahaan dan pelaku usaha lainnya sebanyak 397 unit.

a. Dampak Fisik

Dampak fisik implementasi kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari sejauhmana perkembangan pemanfaatan lahan pertanian dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi pertanian di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Menurut data Jawa Barat dalam Angka Tahun 2012, wilayah Jawa Barat memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah (tegal, ladang, hutan, perkebunan, dll). Pengelompokan lahan tersebut berbeda dengan pengelompokan pada tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2009 terdiri dari lahan sawah, lahan kering dan lahan lainnya.

Pada lampiran 2 dapat diketahui bahwa lahan pertanian (sawah) mengalami perkembangan yang cenderung menurun persentasenya terhadap total keseluruhan lahan di setiap tahunnya. Pada tahun 2008 luas lahan sawah 944.834 Ha atau 28,08% dari total keseluruhan lahan, kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 949.914 Ha atau 27,27% dari total keseluruhan lahan. Pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 942.974 Ha atau 26,48% dari total keseluruhan lahan, kemudian menurun kembali menjadi 937.203 Ha atau 26,21 % dari total keseluruhan lahan. Penurunan tersebut nampak hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (2013:11-13), apabila dilihat dari struktur penguasaan lahan yang dikuasi oleh rumah tangga pertanian maka pada tahun 2013 golongan luas lahan antara 2.000-4.999 m^2 merupakan golongan luas lahan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanan terbanyak yaitu 973.029 rumah tangga. Hal ini berbeda dibandingkan kondisi tahun 2003 dimana golongan luas lahan <1000 merupakan golongan luas lahan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak. Disamping itu, pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan antara 5.000-9.9999 m^2 atau sebesar 0,16 persen yaitu sebanyak 1.159 rumah tangga. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat perbandingan rumah tangga pertanian pengguna lahan dan petani gurem pada tahun 2013. Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan ternyata mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Jawa Barat. Dari sebanyak 3.058.612, sebesar 99,38% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (3.039.716 rumah tangga) dan 0,62% (18.896 rumah tangga) adalah rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan. Dari 99,38% rumah tangga pengguna lahan di Provinsi Jawa Barat, sebesar 75,14 % (2.298.193 rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem. Sedangkan rumah tangga petani non gurem tercatat sebesar 24,24 % (741.523 rumah tangga).

Gambar 1.
Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan Dan Petani Gurem Pada Tahun 2013

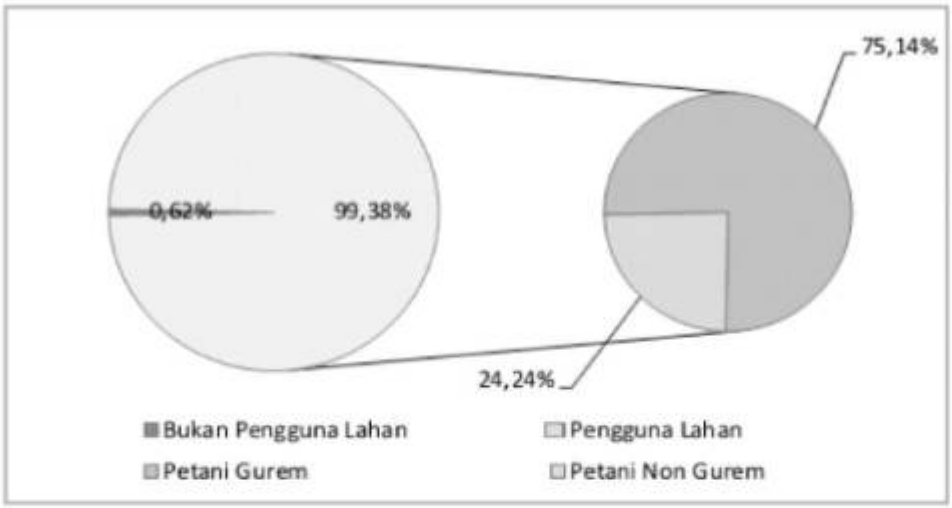

Sumber: Sensus Pertanian (2013:13)

Sementara itu, perkembangan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi pertanian dapat dilihat pada tabel 3 tentang rekapitulasi perkembangan alat mesin pertanian dari tahun 2008-2011. Selain itu pada tahun 2012 pemerintah memberikan bantuan sosial pasca panen dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Padi dan Kedelai) kepada 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun perkembangan data sarana irigasi sawah dapat dilihat pada tabel 3 tentang kegiatan pengelolaan lahan dan air (PLA) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2012. Dari data tersebut nampak bahwa terjadi pengurangan kegiatan PLA dari 11 kegiatan pada tahun 2006 yaitu JITUT, JIDES, EMBUNG, sumur resapan, irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dalam, irigasi sprinkle, irigasi tetes, air perumukaan, PIP, dan SID SYNDRAM, pada tahun 2012 menjadi dua kegiatan saja yaitu JITUT dan JIDES.

Tabel 3.
Rekapitulasi Perkembangan Alat Mesin Pertanian dari tahun 2008-2011

NO	KAB / KOTA	JENIS ALSINTAN				
		TR-2	POMPA AIR	UPJA	APPO	RP3O
1	Bogor	669	262	2	22	4
2	Kota Bogor	81	108	0	1	0
3	Kota Depok	19	6	0	1	1
4	Sukabumi	1.076	16	3	23	5
5	Kota Sukabumi	58	2	0	1	0
6	Cianjur	1.112	321	3	26	4
	WIL. II	**3.015**	**715**	**8**	**74**	**14**
7	Cirebon	3.353	2.594	3	19	3
8	Kota Cirebon	23	63	0	1	0
9	Kuningan	713	237	3	13	5
10	Majalengka	1.639	2.254	3	22	4
11	Indramayu	3.275	5.837	3	25	6
	WIL. III	**9.003**	**10.985**	**12**	**80**	**18**
12	Bekasi	1.307	1.310	3	15	5
13	Kota Bekasi	49	20	0	1	0
14	Karawang	2.402	467	3	28	3
15	Purwakarta	388	625	3	12	5
16	Subang	102	6	3	25	4
	WIL. IV	**4.248**	**2.428**	**12**	**81**	**17**
17	Bandung	195	341	2	18	3
18	Bandung Barat	46	13	0	20	3
19	Kota Bandung	17	0	0	1	0
20	Kota Cimahi	2	0	0	4	0
21	Sumedang	724	391	3	22	2
22	Garut	413	244	3	18	2
23	Tasikmalaya	758	84	3	18	1
24	Kt.Tasikmalaya	124	4	0	7	0
25	Ciamis	1.482	302	1	22	3
26	Kota Banjar	278	62	2	10	5
	WIL. V	**4.039**	**1.441**	**14**	**140**	**19**
	JUMLAH JAWA BARAT:	***36.571***	***29.697***	***78***	***610***	***117***

Sumber: http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1349

Tabel 5
Peningkatan Produksi Pangan Utama 2008-2012

Produk Pangan Utama	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Padi (ton)	12.0%	3.7%	-0.8%	-3.2%
Jagung	23.1%	17.3%	2.3%	8.8%
kedelai	83.0%	-7.4%	0.6%	-15.6%

Sumber: diolah dari Data Produksi Pertanian (http://diperta.jabarprov.go.id/

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat adalah sebanyak 43.826.775 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.493.124. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal lain dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Menurut Jawa Barat Dalam Angka (2013), sebagian besar penduduk Jawa Barat yang bekerja pada tahun 2012, memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa-jasa dan lainnya. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut masing-masing 21,65%; 25,08%; 21,09%; 15,38 %, dan lainnya 16,79%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan utama yang menempati urutan kedua setelah sektor perdagangan. Berdasarkan tabel 6, hasil rekapitulasi data perkembangan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota menunjukkan rata-rata persentase yang cenderung menurun antara tahun 2008 sampai tahun 2011 kemudian meningkat pada tahun 2012.

Tabel 6
Perkembangan Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja di Sektor Pertanian Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2008	2009	2011	2012
	Kabupaten				
1	Bogor	35.07	30.94	12.92	13.36
2	Sukabumi	49.84	47.39	28.27	33.65
3	Cianjur	61.10	61.38	40.50	44.94
4	Bandung	46.58	43.51	20.01	15.51
5	Garut	55.38	53.19	40.50	38.18
6	Tasikmalaya	44.56	46.57	30.43	29.26
7	Ciamis	52.11	53.24	29.91	33.81
8	Kuningan	56.01	54.81	31.16	34.79
9	Cirebon	25.61	27.63	31.86	25.56
10	Majalengka	46.83	42.72	35.95	35.72
11	Sumedang	52.25	52.18	29.05	36.40
12	Indramayu	50.90	51.79	38.55	38.18
13	Subang	55.77	55.31	38.05	44.65
14	Purwakarta	42.70	43.27	22.60	23.02
15	Karawang	43.34	41.58	19.83	18.33
16	Bekasi	26.15	23.50	11.23	10.59
17	Bandung Barat	44.35	43.83	26.36	25.94
	Kota				
18	Bogor	7.95	4.04	1.20	1.62
19	Sukabumi	10.86	12.99	5.01	3.97
20	Bandung	3.14	1.47	0.33	0.99
21	Cirebon	3.62	2.00		0.69
22	Bekasi	7.60	3.76	0.34	0.43
23	Depok	8.68	7.60	2.16	2.09
24	Cimahi	6.13	6.24	1.32	1.91
25	Tasikmalaya	11.34	8.60	8.77	7.94
26	Banjar	33.54	26.62	10.03	13.64
	Persentase Rata-Rata	33.90	32.54	19.86	20.58

Sumber: Diolah dari Jawa Barat dalam Angka tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013

Salah satu dampak yang diharapkan dari kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan adalah meningkatnya kesejahteraan petani. Salah satu *proxy* indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani di pedasan pada bulan dan tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konseptual NTP merupakan alat ukur kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan oleh petani terhadap barang/jasa yang diperlukan baik untuk konsumsi rumah tangga petani maupun kebutuhan dalam proses produksi pertanian.

Secara umum ada tiga macampengertian NTP yaitu *Pertama,* NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

Tabel 4.
Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2006-2012

No	Tahun	JITUT (Ha)	JIDES (Ha)	EMBUNG (Unit)	Sumur Resapan (Unit)	Irigasi Tanah Dangkal (Unit)	Irigasi Tanah Dalam (Unit)	Irigasi Sprinkler (Unit)	Irigasi Tetes (Unit)	Air Permukaan (Unit)	PIP (pkt)	SID HYDRAM (Unit)
1	2006	9,171	11,462	16	24	1	1	13	13	23	16	-
2	2007	5,682	3,700	10	200	30	1	20	5	25	4	2
3	2008	15,600	6,000	1	51	8	5		1	9	5	2
4	2009	8,400	4,900	1	11	1	-	1	2	8	8	1
5	2010	5,000	3,040	7	36	16	2	-	-	17	-	-
6	2011	4,390	2,860	68	114	106	-	-	-	56	54	-
7	2012	8,100	8,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**56,343**	**40,152**	**103**	**436**	**162**	**9**	**34**	**21**	**138**	**87**	**5**

Sumber: http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1816

b. Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial ekonomi dari implementasi kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari sejauhmana perkembangan produksi hasil pertanian, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, tingkat kesejahteraan petani serta capaian prioritas ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat.

Hasil pertanian di Provinsi Jawa Barat meliputi padi, palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka. Hasil rekapitulasi data perkembangan produksi dari setiap kelompok hasil pertanian di Provinsi Jawa Barat sebagaimana Gambar 2 menunjukkan bahwa produksi pertanian untuk kelompok palawija, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara untuk padi dan sayur-sayuran cenderung naik turun. Padi sebagai komoditas pangan utama memiliki jumlah produksi yang cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 kemudian menurun pada tahun 2011-2012. Sementara sayur-sayuran memiliki jumlah produksi yang meningkat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012. Menurut data hasil pengamatan dari 16 Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2009 dan tahun 2010, tingkat kehilangan hasil terutama padi di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun dari 14,01 pada tahun 2006 menjadi 11,05 pada tahun 2010 (http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1005), sementara data tingkat kehilangan hasil pertanian lainnya belum ada.

Gambar 2.
Perkembangan Jumlah Produksi Hasil Pertanian 2008-2012

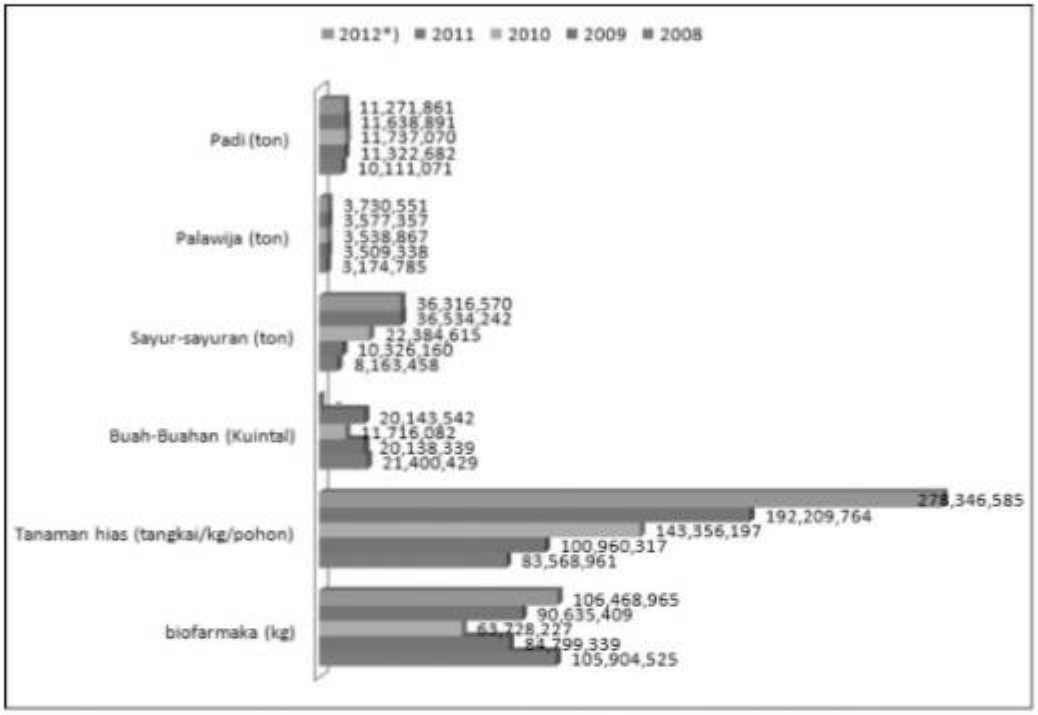

Sumber: diolah dari Data Produksi Pertanian (http://diperta.jabarprov.go.id/)

Hasil pertanian yang termasuk produksi pangan utama secara nasional adalah padi, jagung dan kedelai. Apabila dibandingkan peningkatan produksi pangan ketiga produk tersebut maka produksi padi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung menurun yaitu dari 12% menjadi -3,2%. Produksi jagung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menurun dari 23,1% menjadi 2,3% kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 8,8%. Semantara itu, produksi kedelai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 menurun dari 83,0% menjadi -7,4% kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi 0,6% dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi -15,6 %. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6 pada halaman berikut.

Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. *Kedua*, NTP=100, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun dasarnya. Ketiga, NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

rata-rata bernilai 100. Bergerak secara fluktuatif, NTP bulanan tahun 2008 dirata-ratakan sebesar 96,14 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 dan tahun 2010, rata-rata NTP masih dibawah angka 100, artinya peningkatan pendapatan petani masih dibawah peningkatan pengeluaran atau dengan kata lain petani masih merugi. Pada tahun 2011 NTP mulai membaik terlihat dari rata-rata NTP diatas angka 100 yaitu mencapai 104,90 artinya kesejahteraan petani meningkat 4,90 persen dibandingkan tahun 2007 kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 dengan rata-rata NTP sebesar 108,93, yang berarti bahwa kesejahteraan petani meningkat 8,93 persen dibandingkan tahun 2007. Pada tahun terakhir 2013 diketahui niai NTP

Tabel 7
Perkembangan Rata-Rata Indeks Harga diterima, Indeks Harga Dibayar, dan Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Diterima Petani	119.17	129.77	144.18	156.01	167.41
Indeks Dibayar Petani	122.58	130.67	137.42	143.2	152.53
Nilai Tukar Petani	97.21	99.28	104.93	108.93	109.51

Sumber: (http://jabar.bps.go.id/publikasi/statistik-nilai-tukar-petani-jawa-barat-2013).

Berdasarkan data Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7, dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum pendapatan petani mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran dengan rasio naik per tahun 2,98%. Perkembangan NTP dengan tahun dasar 2007 atau *base year* mengandung arti angka NTP sepanjang tahum 2007 kembali meningkat menjadi 109,51. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan petani tersebut tidak dapat diartikan secara sempit yaitu kesejahteraan dari petani di sektor pertanian tanaman pangan saja tetapi kesejahteraan dalam arti luas yaitu mencakup petani di seluruh sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultira, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Berdasarkan indikator prioritas ketahanan pangan secara nasional, maka dampak kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan terutama pada sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat terhadap pencapaian prioritas tersebut dapat dapat dilihat sebagaimana tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Capaian Prioritas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Barat dengan Capaian Nasional

Indikator	Satuan	Capaian Nasional			Capaian Provinsi Jawa Barat		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Peningkatan Pertumbuhan Pertanian							
PDB Pertanian	%	2,99	3,35	3,97	1,00	0,09	0,71
Laju Peningkatan Produksi Pangan Utama							
Padi	%	3.22	-1.07	5	3.7	-0.8	-3.2
Jagung	%	3,96	-3,37	9,83	17,3	2,3	8,8
Kedelai	%	-6.92	-6.15	0.04	-7.4	0.6	15.6
Kesejahteraan Petani							
Nilai Tukar Petani	Indeks	102,80	105,75	105,87	99,28	104,93	108,3

Sumber: diolah dari Bappenas (2013) dan Jawa Barat dalam Angka (2012 dan 2013)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa pertumbuhan pertanian di Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari PDB Pertanian lebih rendah capaiannya apabila dibandingkan dengan capaian secara nasional. Sementara itu, laju peningkatan produksi pangan utama yaitu padi pada tahun 2010 dan 2011 lebih tinggi persentase capaiannya apabila dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2010 dan 2011 kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan persentase capaian lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional. Untuk produksi jagung, pada tahun 2010 dan 2011 persentase capaiannya lebih tinggi dari pada capaian nasional, kemudian pada tahun 2012 persentase capaiannya lebih rendah daripada capaian nasional. Sementara itu, produksi kedelai di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 persentase capaiannya lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional tetapi pada tahun 2011 dan 2012 persentase capaiannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nasional. Adapun untuk tingkat kesejahteraan petani secara keseluruhan, persentase capaian NTP pada tahun 2010 dan 2011 lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional, kemudian pada tahun 2012 persentase capaiannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nasional. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum capaian prioritas ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dampak kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di sektor pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan bidang ketahanan pangan sektor pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Barat adalah program peningkatan produksi pertanian yang diorganisasikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
2. Dampak fisik implementasi kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
   a. Pemanfaatan lahan pertanian (sawah) dari tahun 2008-2012 mengalami perkembangan yang cenderung menurun persentasenya terhadap total keseluruhan lahan. Penurunan ini nampak hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
   b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2006-2012 mengalami perkembangan yang cenderung menurun terutama dalam kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA).
3. Dampak sosial ekonomi implementasi kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
   a. Perkembangan produksi pertanian di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2008-2012 untuk kelompok palawija, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka cenderung meningkat setiap tahunnya. Sementara untuk padi dan sayur-sayuran cenderung naik turun. Padi sebagai komoditas pangan utama memiliki jumlah produksi yang cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 kemudian menurun pada tahun 2011-2012. Hasil pengamatan dari 16 Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2009 dan tahun 2010, tingkat kehilangan hasil terutama padi di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun dari 14,01 pada tahun 2006 menjadi 11,05 pada tahun 2010.
   b. Perkembangan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota menunjukkan rata-rata persentase yang cenderung menurun antara tahun 2008 sampai tahun 2011 kemudian meningkat pada tahun 2012.

Secara umum pendapatan petani dalam kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran dengan rasio naik per tahun 2,98%. Pada tahun 2009 dan tahun 2010, rata-rata NTP masih dibawah angka 100, artinya peningkatan pendapatan petani masih dibawah peningkatan pengeluaran atau dengan kata lain petani masih merugi. Pada tahun 2011 NTP mulai membaik terlihat dari rata-rata NTP diatas angka

mulai membaik terlihat dari rata-rata NTP diatas angka 100 yaitu mencapai 104,90 artinya kesejahteraan petani meningkat 4,90 persen dibandingkan tahun 2007 kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 dengan rata-rata NTP sebesar 108,93, yang berarti bahwa kesejahteraan petani meningkat 8,93 persen dibandingkan tahun 2007. Pada tahun terakhir 2013 diketahui niai NTP kembali meningkat menjadi 109,51. Namun demikian,

a. peningkatan kesejahteraan petani tersebut tidak dapat diartikan secara sempit yaitu kesejahteraan dari petani di sektor pertanian tanaman pangan saja tetapi kesejahteraan dalam arti luas yaitu mencakup petani di seluruh sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultira, peternakan, perkebunan dan perikanan.
b. Secara umum capaian prioritas ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian nasional.

Saran kebijakan terkait dengan evaluasi dampak kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat terutama di sektor pertanian tanaman pangan adalah meneruskan implementasi kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian prioritas ketahanan pangan seperti program peningkatan produksi pertanian dan mereformulasi kebijakan lainnya yang mendukung seperti program peningkatan pengelolaan lahan pertanian dan sarana dan prasarana pertanian, program pengembangan SDM pertanian, dan program peningkatan kesejahteraan petani.

G. DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2013. *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*. Jakarta:Bappenas.

BPS. 2013. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2013*. Jakarta: BPS

BPS Provinsi Jawa Barat. 2009. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008*. Jawa Barat: BPS Provinsi Jawa Barat.

BPS Provinsi Jawa Barat. 2010. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2009*. Jawa Barat: BPS Provinsi Jawa Barat.

BPS Provinsi Jawa Barat. 2011. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2010*. Jawa Barat: BPS Provinsi Jawa Barat.

BPS Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bappeda. 2013. *Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012*. Jawa Barat: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dan BPS Provinsi Jawa Barat.

BPS Provinsi Jawa Barat. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). Jawa Barat: BPS Provinsi Jawa Barat.

Dewan Ketahanan Pangan (DKP). 2011. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014*. Jakarta: DKP

Samodra Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat No. 050/Kep/613/PR/2011 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Data Produksi Pertanian. http://diperta.jabarprov.go.id/ didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

Data Produksi Pertanian. http://diperta.jabarprov.go.id/ didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2012. http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1816 didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

Perkembangan Rata-Rata Indeks Harga diterima, Indeks Harga Dibayar, dan Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2009-2013. http://jabar.bps.go.id/publikasi/statistik-nilai-tukar-petani-jawa-barat-2013 didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

Rekapitulasi Perkembangan Alat Mesin Pertanian dari tahun 2008-2011. http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1349 didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

Tingkat Kehilangan Hasil. http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1005). didownload pada tanggal 10 Maret 2014.

LAMPIRAN 1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kerangka Pencanaan (Juta Rp)					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5		
Mendorong untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pertanian	Program: ● Pemberdayaan sumber daya pertanian, dilaksanakan melalui kegiatan: ● Pelatihan dan peningkatan kinerja petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT, PHP), aparatur pertanian dan masyarakat tani. ● Fasilitasi Peningkatan Peran Kelembagaan Petani ● Fasilitasi ketersediaa alat da mesin pertanian ● Fasilitasi peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan ● Fasilitasi peningkatan pemerfaatan sumber daya lahan dan air	**Outcome:** 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pertanian 2. Meningkatkan sarana produksi pertanian **Output:** 1. Terlaksanakannya pelatihan dan peningkatan kinerja petugas lapang (penyuluh, DPOT, PBT, PHP), aparatur pertanian dan masyarakat tani 2. Terfasilitasinya peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan. 3. Terfasilitasinya peningkatan pemanfaatan sumber daya lahan dan air	3 segiatan	5.159	4.845	7.450	5.000	5.308	Diperta	Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kerangka Pencanaan (Juta Rp)					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5		
Mendorong peningkatan ketersediaan pangan	Ketersdiaan pangan masyarakat Jawa Barat	Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan	Program: Peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian Fasilitasi CEMAR	**Outcome:** Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan **Output:** Tercapainya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Terlaksananya pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura Terlaksananya pengembangan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura Terlaksanakannya pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian Terfasilitasinya CEMAR		23.714	20.737	11.074	19.045	20.128	Diperta	Diperta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kerangka Pencanaan (Juta Rp)					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5		
Mendorong peningkatan kualitas produk pertanian Mewujudkan pembagian pendapatan yang wajar diantara pelaku pasar	Tersedianya hasil pertanian yang berkualitas Adanya efisiensi usaha pertanian gaman uk olahan memiliki tambah Peningkatan arus pemasaran produk pertanian Peningkatan akses informasi pasar	Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Meningkatan kemitraan dengan stakeholder dan terobosan pemasaran produk pertanian	**Program:** Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan: Pengembangan sarana dan prasarana pasca panen dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura Peningkatan keragaman dan mutu hasil pertanian	**Outcome:** 1. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian 2. Meningkatan kemintraan dengan stakeholder dan terobosan pemasaran produk pertanian **Output:** Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pasca panen dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura Terlaksananya peningkatan keragaman dan mutu hasil pertanian	2 kegiatan	1.612	1.300	1.300	1.500	1.592	isperta	Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kerangka Pencanaan (luta Rp)					Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Thn-1	Thn-2	Thn-3	Thn-4	Thn-5		
Mewujudkan kesimbangan lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan	Penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai SOP Peningkatan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati	Mewujudkan kelestarian sumber daya alam melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan	Program: Pencegahan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, dilaksanakan melalui kegiatan: Pengamatan monitoring OPT tanaman pangan dan hortikultura Informasi perkembangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim Bimbingan teknis pengendalian OPT Koordinasi dan fasilitasi gerakan pengendalian OPT dan DFI Pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura	Outcome: Mewujudkan kelestarian sumber daya alam melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan Output: • Terlaksananya pengamatan monitoring OPT tanaman pangan dan hortikultura • Tersedianya Informasi perkembangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim • Terlaksanakan nya Bimbingan teknis pengendalian OPT • Terlaksanakan nya koordinasi dan fasilitasi gerakan pengendalian OPT dan DFI • Terlaksanakan nya engendalian OPT tanaman pangan dan hor	5 kegiatan	2.761	500	501	1.500	1.592		

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat (2011)

LAMPIRAN 2
Pemanfaatan Lahan Pertanian di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2011			Tahun 2012		
		Luas Lahan (Ha)			Luas Lahan (Ha)			Luas Lahan (Ha)			Luas Lahan (Ha)		
		Sawah	Kering	Lahan Lainnya	Sawah	Kering	Lahan Lainnya	Sawah	Kering	lahan bukan pertanian	Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
	Kabupaten												
1	Bogor	48,321	248,388	2,720	48,837	209,217	2,545	48,196	119,853	101,498	47,932	123,230	101,327
2	Sukabumi	69,239	321,305	2,243	68,188	326,843	1,446	65,855	231,503	111,773	64,599	282,461	71,470
3	Cianjur	65,483	253,305	2,119	65,881	276,482	2,186	65,993	172,466	111,689	66,180	171,470	112,498
4	Bandung	36,464	120,031	1,325	36,398	134,308	1,014	36,075	73,946	66,492	35,975	73,690	66,575
5	Garut	50,127	237,799	1,884	50,273	255,178	1,884	50,270	153,594	102,655	50,151	153,845	102,523
6	Tasikmalaya	49,507	204,656	4,244	49,567	228,178	4,141	49,460	169,813	51,979	49,327	202,424	19,131
7	Ciamis	51,870	197,405	4,858	52,286	205,633	4,268	51,903	122,311	70,265	51,095	121,826	70,748
8	Kuningan	29,078	77,974	545	29,045	78,864	558	29,053	41,153	40,267	28,827	43,616	37,985
9	Cirebon	54,279	15,068	4,762	54,581	37,561	4,758	53,809	15,432	28,724	53,594	15,882	28,489
10	Majalengka	51,137	56,255	759	51,899	65,299	642	51,899	35,349	33,176	51,428	35,205	33,791
11	Sumedang	33,277	107,917	638	33,176	117,640	638	33,277	61,549	57,394	33,178	67,077	51,965
12	Indramayu	119,752	55,621	14,396	118,663	61,163	12,894	116,675	54,895	32,441	116,759	56,249	36,192
13	Subang	84,637	92,350	4,475	85,362	104,116	4,823	85,635	73,238	48,042	84,928	74,308	45,940
14	Purwakarta	16,566	66,996	2,475	16,566	75,007	2,475	16,573	38,431	42,168	16,573	39,430	41,169
15	Karawang	94,311	59,645	11,723	97,529	58,344	9,990	98,346	33,839	43,142	98,079	38,877	38,371
16	Bekasi	55,074	38,813	11,267	54,425	53,636	11,322	53,532	34,717	37,941	52,966	34,661	39,761
17	Bandung Barat	19,329	120,245		20,654	99,383	1,377	21,041	68,289	41,574	21,041	94,234	15,629
	Kota												
18	Bogor	1,006	2,809	118	960	10,278	67	1,061	1,470	9,319	752	2,372	8,726
19	Sukabumi	1,859	856	92	1,929	2,669	91	1,751	412	2,637	1,589	392	2,819
20	Bandung	1,727	14,930	72	1,983	8,300	66	1,354	1,414	13,963	1,330	963	14,438
21	Cirebon	333	1,351	107	333	2,989	107	273	857	2,626	262	766	2,728
22	Bekasi	667	19,157	77	664	20,309	78	469	4,354	16,228	491	4,354	16,204
23	Depok	973	18,621	436	932	18,057	293	805	6,128	13,096	517	3,214	16,298
24	Cimahi	239	453	15	293	3,859	15	275	350	3,542	296	326	3,545
25	Tasikmalaya	6,269	10,295		6,172	10,136	681	6,076	5,982	5,098	6,016	6,001	5,139
26	Banjar	3,310	6,514	224	3,318	7,745	224	3,318	5,489	2,873	3,318	5,238	3,214
Jumlah		**944,834**	**2,348,759**	**71,574**	**949,914**	**2,471,194**	**68,583**	**942,974**	**1,526,834**	**1,090,602**	**937,203**	**1,652,111**	**986,675**
Total Keseluruhan Lahan				**3,365,167**			**3,482,751**			**3,560,410**			**3,575,989**
% terhadap total lahan		28.08%	69.80%	2.13%	27.27%	70.96%	1.97%	26.48%	42.88%	30.63%	26.21%	46.20%	27.59%

Sumber: Diolah dari Jawa Barat dalam Angka tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013